

PENGUATAN KETAHANAN DAN INTEGRITAS SEKTOR JASA KEUANGAN MENDUKUNG STABILITAS SISTEM KEUANGAN

Stabilitas Sektor Jasa Keuangan (SJK) terjaga di tengah dinamika perekonomian global dan domestik

PERKEMBANGAN INDIKATOR PEREKONOMIAN

GLOBAL

- Kinerja relatif baik sejalan dengan penguatan kinerja manufaktur global dan tren pemulihan keyakinan konsumen.
- Peningkatan tensi geopolitik dan fragmentasi geoekonomi pada awal 2026, termasuk di Timur Tengah serta dinamika kebijakan perdagangan AS, menjadi *downside risk* yang berpotensi meningkatkan volatilitas pasar keuangan global.

Amerika Serikat

- Kuartal IV 2025 terpantau tumbuh 1,4 persen *qta*, jauh di bawah ekspektasi pasar sebesar 2,5 persen, didorong oleh *government shutdown* dan pelemahan konsumsi, di tengah pasar tenaga kerja masih relatif solid.
- Tekanan inflasi kembali meningkat dan sejalan dengan perkembangan tersebut, ekspektasi pasar terhadap pemangkasan suku bunga pada pertengahan tahun mulai menurun, dengan kecenderungan kebijakan suku bunga *higher for longer*.

Tiongkok

Masih menghadapi tekanan permintaan domestik di tengah berlanjutnya krisis sektor properti, meskipun kinerja eksternal masih mencatatkan surplus.

DOMESTIK

- Kuartal IV 2025 mencatat pertumbuhan yang solid yaitu sebesar 5,39 persen *yoy*, sehingga secara keseluruhan tahun 2025 tumbuh 5,11 persen.
- Inflasi *headline* meningkat terutama akibat efek basis rendah tahun sebelumnya.

- Indeks Keyakinan Konsumen masih berada di zona optimistis meskipun menunjukkan moderasi.
- Aktivitas manufaktur tetap berada dalam fase ekspansif pada awal 2026.

PERKEMBANGAN SEKTOR JASA KEUANGAN

PASAR MODAL, DERIVATIF KEUANGAN, DAN BURSA KARBON (PMDK)



IHSG
8.235,49
Feb'26

Jan'26 (8.329,61)

Jumlah Investor
22,88 Juta
Feb'26

Jan'26 (21,07 Juta)

Penghimpunan Dana
Rp
39,09 T
Feb'26

NAB Reksa Dana
Rp
726,26 T
Feb'26

Securities Crowdfunding

s.d Februari 2026

1.008
penerbitan Efek

194.497
pemodal

594
penerbit

Rp23,65 miliar
dana yang dihimpun
mtd 26 Feb'26



Pasar Derivatif Keuangan

s.d Februari 2026

113
pihak penyelenggara
s.d 26 Februari 2026

29.514 lot
Volume Transaksi
mtd Februari 2026

Perdagangan Karbon

s.d 27 Februari 2026

Rp91,87 miliar
Akumulasi Nilai Perdagangan

2.218 tCO2e
Volume Unit (Feb'26)

153
pengguna jasa



PERBANKAN (PBKN)

Kredit



Dana Pihak Ketiga



Kredit Investasi

22,38%
yoy
Jan'26

Kredit Modal Kerja

4,13%
yoy
Jan'26

Kredit Konsumsi

6,58%
yoy
Jan'26

Jan'26

CAR
25,87%

NPL Gross
2,14%

LaR
9,01%

AL/DPK
27,54%

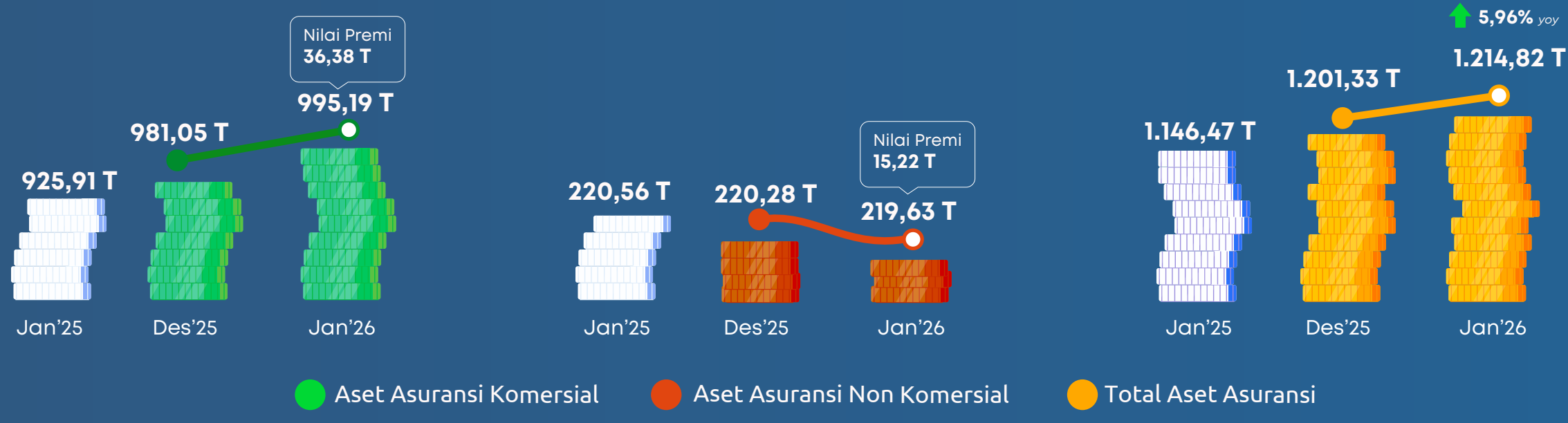
NIM
4,63%

AL/NCD
121,23%

RoA
2,49%

PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN (PPDP)

Aset Asuransi (Rp)



RBC Asuransi Jiwa Jan'26
478,06%

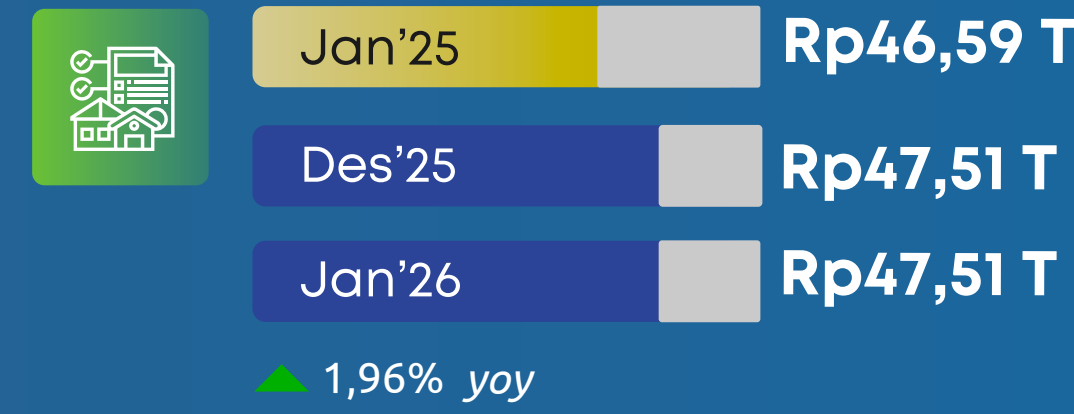


RBC Asuransi Umum dan Reasuransi Jan'26
323,47%

Aset Dana Pensiun (Rp)



Aset Perusahaan Penjaminan



Nilai Imbal Jasa Penjaminan Jan'26
Rp0,68 T

LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA (PVML)

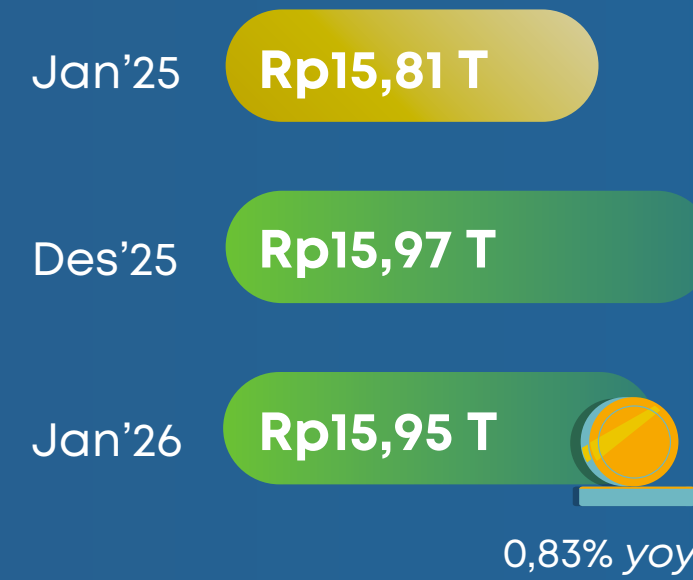
Piutang Pembiayaan



Outstanding Pembiayaan Pinjaman Daring



Pembiayaan Modal Ventura



Penyaluran Pergadaian



TWP 90 Pinjaman Daring Jan'26
4,38%

Gearing Ratio Perusahaan Pembiayaan Jan'26
2,11x

NPF Perusahaan Pembiayaan (gross) Jan'26
2,72%

INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN, ASET KEUANGAN DIGITAL, DAN ASET KRIPTO (IAKD)

Sandbox



Aset Kripto



Penyelenggara Perdagangan



Penyelenggara ITSK

17 Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan (PAJK) Feb'26

8 Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA) Feb'26

Nilai Aset Rp185,88 Miliar Jan'26

Nilai Aset Rp469,44 Miliar Jan'26

SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH

Pasar Modal Syariah Feb'26



PVML Syariah Jan'26



Perbankan Syariah Des'25

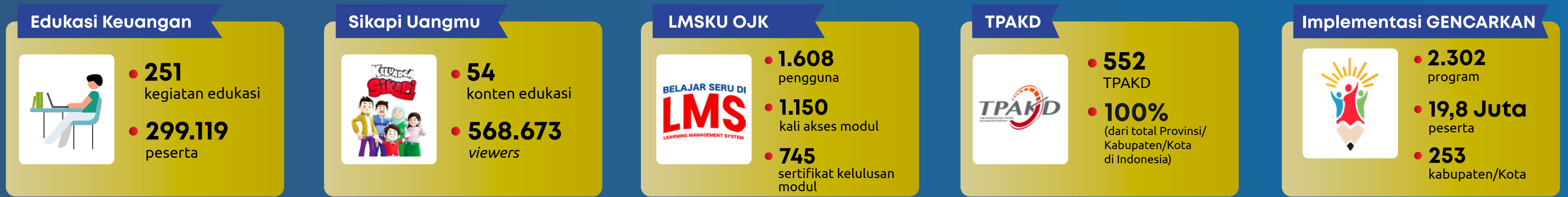


PPDP Syariah Jan'26



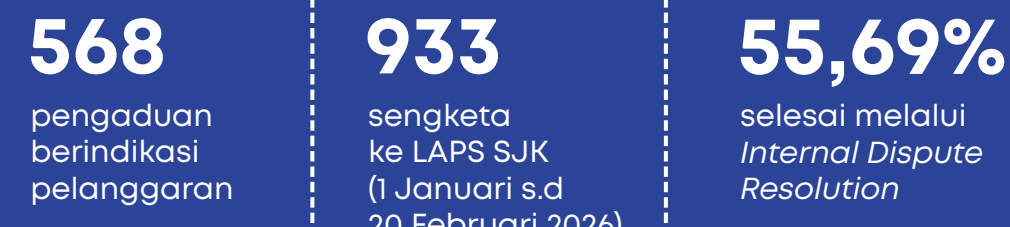
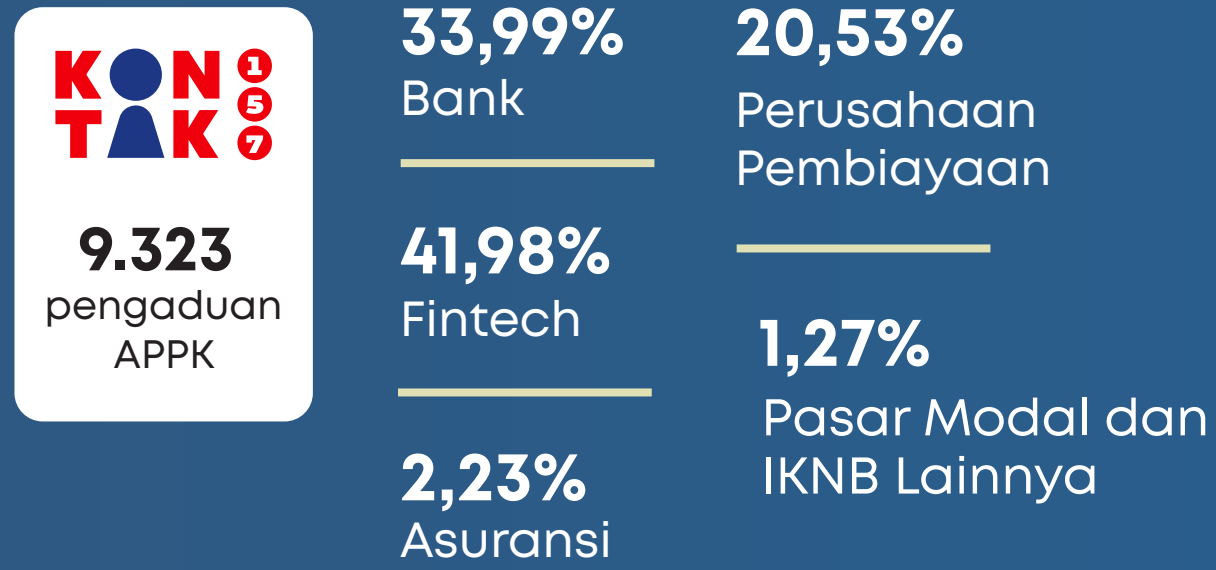
PENGAWASAN PERILAKU PELAKU USAHA JASA KEUANGAN, EDUKASI, DAN PELINDUNGAN KONSUMEN (PEPK)

Program Literasi dan Edukasi Keuangan (1 Januari s.d 20 Februari 2026)



Program Pelindungan Konsumen dan Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (1 Januari s.d 5 Februari 2026)

65.139 Layanan Konsumen



Indonesia Anti-Scam Centre (IASC)

22 November 2024 s.d 26 Februari 2026



Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal

1 Januari s.d 26 Februari 2026



Penegakan Ketentuan Pelindungan Konsumen

1 Januari s.d 26 Februari 2026



ARAH KEBIJAKAN OJK

Dalam rangka menjaga stabilitas SJK dan meningkatkan perannya bagi pertumbuhan ekonomi nasional, OJK menempuh langkah-langkah kebijakan sebagai berikut:

Kebijakan Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

- OJK, BEI dan KSEI terus mengakselerasi reformasi struktural pasar modal Indonesia guna memperkuat integritas, transparansi, dan daya saing pasar, sekaligus menindaklanjuti masukan dari MSCI.
 - Progress proposal** yang telah disampaikan oleh pihak Indonesia kepada MSCI:
 - Disclosure pemegang saham di atas 1 persen.** OJK telah menetapkan Keputusan Dewan Komisiner OJK mengenai penetapan KSEI dan BEI sebagai penyedia data. *Disclosure* data kepemilikan pemegang saham di atas 1 persen dipublikasikan dengan data per akhir Februari 2026 pada awal Maret 2026.
 - Granularity klasifikasi investor.** KSEI dengan dukungan *market participants* (Anggota Bursa dan Bank Kustodian) terus mempercepat penyelesaian *granularity* klasifikasi investor. Per 27 Februari 2026, *progress* penyelesaian telah mencapai 94 persen. OJK optimistis bahwa penyiapan *granularity* klasifikasi investor dapat diselesaikan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan, yaitu pada Maret 2026.
 - Kebijakan baru free float.** Proses permintaan pendapat publik oleh BEI atas *draft* Peraturan I-A telah selesai dilakukan. Saat ini *draft* Peraturan I-A tengah melalui proses persetujuan Dewan Komisaris BEI, untuk selanjutnya disampaikan kepada OJK. Setelah peraturan ini dirilis, BEI akan menambahkan notasi khusus untuk saham-saham Emiten yang belum memenuhi batas minimum *free float* 15 persen.
 - Pengumuman High Shareholding Concentration.** Sejak awal Februari 2026, OJK, BEI, dan KSEI telah bersama-sama melakukan *assessment* mengenai implementasi pengumuman *High Shareholding Concentration*, dan saat ini tengah dilakukan finalisasi kajian dimaksud, dengan rencana implementasi pada Maret 2026.
 - OJK bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan dan SRO terus berkomitmen untuk mewujudkan inisiatif-inisiatif percepatan reformasi, antara lain melalui perumusan pembentukan Satgas Reformasi Integritas Pasar Modal terkait kerangka, ruang lingkup, dan keanggotaan yang akan dikuatkan melalui Surat Keputusan Bersama untuk mengoptimalkan dukungan baik aspek kebijakan, penyesuaian regulasi, penguatan pengawasan, pendalaman pasar, koordinasi serta sinergi lintas lembaga dan instansi terkait sesuai kewenangan masing-masing.

OJK berkomitmen untuk berperan aktif dalam Satgas tersebut dan memastikan penyampaian kebijakan dan langkah-langkah reformasi kepada publik secara baik, transparan, dan berkala.
- Menetapkan kebijakan pemberian perlakuan khusus atas kredit/pembiayaan kepada debitur yang terkena dampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak 10 Desember 2025. Sampai dengan Januari 2026, telah diberikan restrukturisasi kredit menggunakan kebijakan relaksasi OJK tersebut sebesar Rp12,6 triliun untuk 246 ribu rekening.

Kebijakan Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (SJK) serta Infrastruktur Pasar

- Telah menetapkan atau menerbitkan:
 - POJK Nomor 1 tahun 2026 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan oleh Bank Umum.
 - PADK Nomor 45 tahun 2025 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah.
 - PADK Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
- Dalam proses penyusunan:
 - RPOJK tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum BPR.

- b. RPOJK tentang Pelaporan dan Permintaan Data Transaksi Pendanaan oleh Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).
 - c. RPOJK tentang Perilaku Pihak yang Melakukan Penyampaian Informasi Sektor Jasa Keuangan.
 - d. RPADK tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti/*Buy Now Pay Later* (BNPL) Bagi Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah.
3. Menyelenggarakan *45th ASEAN+3 Bond Market Forum (ABMF) Meeting and Other Events* yang bertujuan untuk mendorong integrasi pasar obligasi ASEAN+3 melalui standarisasi dan harmonisasi regulasi, praktik pasar, serta infrastruktur transaksi obligasi lintas batas.
 4. Menyelenggarakan *Joint 34th Cross-Border Settlement Infrastructure Forum (CSIF)* dan *3rd Digital Bond Market Forum (DBMF)* yang melibatkan negara-negara ASEAN+3. Secara garis besar, DBMF akan berfokus pada pembahasan tentang aset digital, sementara CSIF akan berfokus pada studi kasus bisnis nyata untuk mendorong transaksi lintas batas, khususnya obligasi pemerintah serta mewujudkan keterkaitan antara bank sentral dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian efek terpusat di kawasan ASEAN+3.
 5. Dalam rangka konsolidasi dan sinergi industri perbankan melalui Kelompok Usaha Bank (KUB) Bank Pembangunan Daerah (BPD), OJK menyelenggarakan pertemuan dengan pengurus Bank Induk, Pelaksana Perusahaan Induk, serta seluruh Bank Anggota KUB BPD.
 6. Menyelenggarakan *The 2nd Indonesia Climate Banking Forum (ICBF): Climate Risk Management and Banking Resilience to Support Climate Finance Investment*, yang merupakan kelanjutan dari forum perdana pada 2024 yang ditandai dengan peluncuran *Climate Risk Management & Scenario Analysis (CRMS)* sebagai tonggak awal pengelolaan risiko perubahan iklim secara terstruktur dan komprehensif di sektor perbankan.
 7. Memperkuat kerja sama otoritas regional dengan berpartisipasi dalam *The EMEAP-BCBS-FSI 20th Asia-Pacific High-level Meeting on Banking Supervision* dan *Senior Official Meeting East Asia Pacific Central Banks – Working Group on Banking Supervision*.
 8. Tengah melakukan kajian penyusunan laporan rencana bisnis dan laporan aktuaris berbasis PSAK 117 serta berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) terkait penyesuaian ketentuan perpajakan terkait penerapan PSAK 117.
 9. Dalam rangka memperkuat kualitas tata kelola dan integritas industri PVML, OJK telah menyelenggarakan *PVML Fit and Proper Test Assessor Summit 2026*.
 10. Terkait pengawasan Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto, OJK dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) secara resmi mengakhiri masa peralihan tugas pengaturan dan pengawasan Aset Keuangan Digital, termasuk Aset Kripto, dari Bappebti kepada OJK, melalui penandatanganan Berita Acara Pengakhiran Nota Kesepahaman antara OJK dan Bappebti.
 11. Untuk memberikan pemahaman mengenai konsep *Real-World Asset (RWA)* Tokenisation sekaligus mendiskusikan kesiapan regulasi di Indonesia dalam menyambut inovasi tokenisasi properti, OJK bersama AFSI menyelenggarakan Dialog Infinity dengan tema "*From Land to Ledger: The Legal Challenge of Property Tokenisation in Indonesia*".
 12. Dalam rangka menjembatani kesenjangan antara percepatan inovasi industri fintech, dinamika regulasi, dan kesiapan kurikulum pendidikan tinggi sebagai pencetak talenta unggul bagi industri keuangan digital, OJK bersama Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) menyelenggarakan *Training of Trainers (ToT) IAKD* bagi dosen perguruan tinggi.
 13. Sebagai langkah strategis memperkuat inovasi dan pengembangan talenta digital di sektor jasa keuangan nasional, OJK bersama Bank Indonesia menginisiasi Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI). Penyelenggaraan *Kick-off PIDI - DIGDAYA x Hackathon 2026* tersebut menandai dimulainya registrasi Hackathon 2026 yang terbuka bagi masyarakat umum dengan kategori profesional dan mahasiswa, yang akan diselenggarakan sejak Februari hingga September 2026.



Pengembangan dan Penguatan SJK Syariah

1. Sebagai tindak lanjut Pasal 9 POJK Nomor 11 Tahun 2023, Per 20 Februari 2026 terdapat 3 perusahaan yang telah melakukan *spin-off* dengan mendirikan perusahaan baru dan 2 perusahaan *spin-off* dengan mengalihkan portofolio kepada perusahaan lain. Selain itu, terdapat 5 perusahaan yang dalam proses *spin-off* dengan pendirian perusahaan baru dan 5 perusahaan yang dalam proses *spin-off* dengan mengalihkan portofolio kepada perusahaan lain.
2. Inisiasi dalam rangka pengembangan keuangan syariah, melalui:
 - a. Penyusunan *draft* pedoman produk ijarah, pedoman produk IMBT, dan pedoman wakalah *ready stock*.
 - b. Penyelenggaraan *Focus Group Discussion (FGD)* Pemantauan Implementasi *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027 dalam rangka pemantauan implementasi program kerja dan rencana aksi RP3SI.
 - c. Penyelenggaraan Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) tahun 2026 sebagai kampanye nasional keuangan syariah yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan Syariah (PUJKS), *Self Regulatory Organization (SRO)*, asosiasi industri, kementerian/lembaga, serta pemangku kepentingan terkait di pusat dan daerah. Dua besaran kegiatan utama Kajian dan Obrolan Seputar Keuangan Syariah (KOLAK) dan Kompetisi Keuangan Syariah di Bulan Ramadan (KURMA).



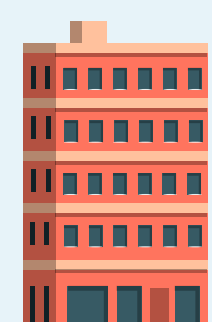
Penguatan Tata Kelola OJK

- OJK senantiasa melakukan langkah penguatan integritas dan tata kelola yang baik di sektor jasa keuangan, antara lain:
1. Peningkatan kompetensi dan kualitas SDM dalam menjalankan fungsi pengawasan SJK melalui kerja sama dengan BPK RI yang telah terjalin sejak tahun 2023 melalui pelatihan *Quality Control & Quality Assurance (QCQA)*.
 2. Forum Rapat Kerja Pengawasan Internal untuk meningkatkan internalisasi penerapan *combined assurance* dan *three lines model*, serta adopsi kerangka kerja internasional yang merujuk pada *Global Internal Audit Standard (GIAS)*.
 3. Penyelenggaraan Forum Penguatan *Governance, Risk and Compliance (GRC)* dengan Tema "Praktik dan Tantangan Pengelolaan LHKPN serta Gratifikasi dalam Penguatan Transparansi Organisasi".
 4. Peningkatan upaya memperkuat tata kelola organisasi dan sektor jasa keuangan secara berkelanjutan melalui pelaksanaan serangkaian Kegiatan Governansi antara lain *Integrity Talk*.



Penegakan Ketentuan di SJK dan Perkembangan Penyidikan Perkembangan Fungsi Penyidikan

1. Perkembangan fungsi Penyidikan sampai dengan 28 Februari 2026:



181

Perkara selesai

143

Perkara PBKN

9

Perkara PMDK

24

Perkara PPDP

5

Perkara PVML



157

Putusan Pengadilan

151

Inkracht

6

Kasasi

2. Penegakan hukum atas kasus di sektor jasa keuangan, telah dilakukan:

- Penetapan tiga tersangka serta melimpahkan berkas perkara atas kasus Tindak Pidana PT BPR Panca Dana kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Depok;
- Pelaksanaan Tahap II berupa penyerahan tersangka dan barang bukti perkara tindak pidana pasar modal berupa transaksi semu atau menyesatkan atas perdagangan saham PT Sriwahana Adityakarta, Tbk (PT SWAT) dengan menyerahkan satu tersangka berinisial SAS kepada Kejaksaan Negeri Boyolali, Jawa Tengah;
- Pelaksanaan Tahap II berupa penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum yang dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan atas perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan yang melibatkan perusahaan penyelenggara pinjaman daring (pindar) PT Crowde Membangun Bangsa (PT CMB) dan YS selaku Direktur Utama sekaligus pemegang saham perusahaan dimaksud; serta
- Pelaksanaan Tahap II atas perkara tindak pidana sektor jasa keuangan yang dilakukan dua pengurus PT Investree Radhika Jaya (PT IRJ) berupa penyerahan tersangka Sdr. AAG dan Sdr. APP serta barang bukti perkara tindak pidana sektor jasa keuangan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

